



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

PARAF






1	SEKRETARIS DAERAH	
2	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	21
3	ASISTEN ADMINISTRASI	1
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	1
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 31);

PARAF

1	SEKRETARIS DAERAH	
2	STAF ANLIT BID. PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	
3	ASISTEN ADMINISTRASI	
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 31), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Agustus 2017

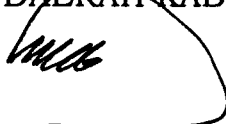
BUPATI BATANG,



WIHAJI






Diundangkan di Batang
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 39

PARAF	
1	SEKRETARIS DAERAH 
2	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK 
3	ASISTEN ADMINISTRASI 
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI 
5	KEPALA BAGIAN HUKUM 

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 39 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64
 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN

NO	KIND	INDIKATOR	TARU					SUMBER DATA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	Meningkatnya profesionalitas aparaturnya dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	a. Persentase SDM perencanaan yang telah memperoleh pendidikan/pelatihan teknis perencanaan	-	-	-	-	-	75%	BAPELITBANG
		b. Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)	-	-	-	-	-	-	90%
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	a. Tingkat kesesuaian RPJMD dan RKPd	-	-	-	-	-	100%	BAPELITBANG
		b. Tingkat kesesuaian RPJMD dengan Rencana OPD	-	-	-	-	-	100%	BAPELITBANG
		c. Tingkat kesesuaian RKPd dengan Renja OPD	-	-	-	-	-	100%	BAPELITBANG
3	Meningkatnya layanan dan informasi publik	d. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0	12	12	12	12	15	DISKOMINFO
		a. Inovasi aplikasi dalam website milik pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	50
4	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah	b. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	-	-	-	-	-	-	-
		c. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3,3	3,63	3,99	4	4	4	-
		1 LPPPL	PAIKOMINFO						
1	SEKRETARIS DAERAH								
2	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN								
3	ASISTEN BIDANG DISPERUSKAS								
4	KEPALA BIDANG ORGANISASI								
5	KEPALA BAGIAN HUKUM								

1	SEKRETARIS DAERAH	
2	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	
3	ASISTEN BIDANG DISPERUSKAS	
4	KEPALA BIDANG ORGANISASI	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
5	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	2	2	4	3	3	4	KESBANGPOL	
		b. Jumlah satuan Linmas per Desa	-	-	-	-	-	10 anggota	SATPOL PP	
		c. Rasio poskamtling per desa/kelurahan	6.18	6.26	6.34	6.46	6.54	5	SATPOL PP	
		d. Presentase demo yang tertangani	-	-	-	-	-	100%	KESBANGPOL	
6	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam	b. Jumlah LSM	68	90	105	110	115	115	KESBANGPOL	
		a. Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	114,00	120,52	126,54	132,87	139,52	146,49	DPMPPTSP DAN NAKER	
7	Meningkatnya penanaman modal di daerah	b. Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500	500	500	500	500	500	DPMPPTSP DAN NAKER	
		c. Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000	1000	1000	1000	1.000	1.000	DPMPPTSP DAN NAKER	
		d. Jumlah jin usaha yang diterbitkan	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.500	DPMPPTSP DAN NAKER	
		a. Tingkat pengangguran Terbuka (%)	5,9	6,98	6,88	6,78	6,68	4,17	DPMPPTSP DAN NAKER	
8	Meningkatnya penyerapan kerja di berbagai sektor	b. Pencari kerja yang ditempatkan	31%	23%	50%	50%	50%	60%	DPMPPTSP DAN NAKER	
		c. Keselamatan dan perlindungan	20%	25%	30%	35%	40%	60%	DPMPPTSP DAN NAKER	
		a. Revitalisasi pasar rakyat	-	-	-	-	-	25%	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional	b. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	16,19%	16,19%	15,99%	16,00%	16,09%	16,12%	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
		c. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	17,14%	16,65%	16,49%	16,61%	16,66%	16,71%	DISPERINDAGKOP DAN UKM	
		d. Ekspor Bersih Perdagangan	48.175.517,70	48.175.517,70	54.093.069,47	54.182.287,35	65.452.614,02			

16,71% DISPERINDAGKOP DAN UKM

11,907,875,417 DISPERINDAGKOP DAN UKM

2. SIAK-SABER DAN UKM

3. ASISTEN ADMINISTRASI

4. KEPALA BANGSAI OF GANASIA

5. KEPALA BANGSAI BANGSAI

10	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan	a. Pertumbuhan Industri (unit)	10,404	10,488	10,573	10,66	10,755	10,851	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		b. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	25,61	26,02	25,6	25,75	26	26,05	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		c. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,62%	27,53%	27,16%	27,23%	27,30%	27,50%	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		d. Jumlah Unit usaha sentra industri	212	216	215	230	240	255	DISPERINDAGKOP DAN UKM
		a. Nilai tukar petani (%)	100	101,82	105,59	100	100,30	100,31	DISPAPERTA
		b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	30,44	30,53	30,60	27	27	27,01	DISPAPERTA
		c. Cakupan Bina Kelompok Peternak	42,9	43	47	57	63	69	DISLUTKANNAK
		d. Ketersediaan Lahan Ternak	78,70	78,70	80,28	83,52	85,19	86,89	DISLUTKANNAK
		e. Cakupan bina kelompok Dengewas	210	240	270	300	330	360	DISLUTKANNAK
		f. Tingkat Konsumsi ikan	14,00	24,17	27,00	30,00	33	35	DISLUTKANNAK
11	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian	g. Tingkat Pengelolaan Konservasi	Didirikan	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola Optimum	DISLUTKANNAK
		h. Cakupan bina kelompok Tangkap	40	49	59	61	63	65	DISLUTKANNAK
		i. Cakupan bina kelompok Budidaya	85	70	60	65	68	70	DISLUTKANNAK
		j. Cakupan bina kelompok Pengolahan dan Pemasar-Perikanan (Poklahsar)	17	14	15	17	20	25	DISLUTKANNAK
		a. Populasi Hewan ternak (ekor)	65	65	140	130	160	165	DISLUTKANNAK
		- Sapi Perah	23.150	27.967	17.500	18.500	19.000	20.000	DISLUTKANNAK
		- Sapi Potong	3.460	3.570	1.400	1.450	1.500	1.550	DISLUTKANNAK
		- Kerbau	78.200	78.900	76.000	77.000	78.000	80.000	DISLUTKANNAK
		- Domba	39.500	40.200	30.500	30.600	32.500	33.500	DISLUTKANNAK
		- Ayam buras	701.600	709.300	650.300	600.000	752.715	767.769	DISLUTKANNAK
- Ayam ras	3.686.250	3.455.952	9.455.952	12.000.000	19.000.000	24.000.000	DISLUTKANNAK		
- Itik	147.433	150.381	110.000	111.000	112.000	112.000	DISLUTKANNAK		
b. Produksi perikanan Tangkap (ton)	30.548	32.716	34.000	36.000	38.000	40.000	DISLUTKANNAK		
c. Produksi perikanan Budidaya (ton)	1.283,20	1.796,10	2.250,50	2.700,60	3.240,72		DISLUTKANNAK		
d. Ketersediaan pangan utama (ton)									

1. Kepala Dinas
 2. Kepala Bidang
 3. ASISTEN DEWAN
 4. KEPALA PUSKASIKAWAN
 5. KEPALA ANGGARAN

13	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM	- Beras	100.881	101.073	101.219	181.046	181.951	181.951	
		- Jagung	39.998	40.554	38.569	43.769	44.206	44.206	
		e. Produksi hasil ternak :							
		- Daging	9.020.200	9.210.300	9.650.000	9.700.000	9.750.000	9.800.000	
		- Telur	3.850.500	3.910.500	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.100.000	
		- Susu	220.300	225.500	105.000	110.000	115.000	120.000	
		f. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	80	80	90	90	100	100	
		g. Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	82	80	88	90	100	100	
		h. Cadangan Pangan Daerah	4,00	9,00	14,00	19,00	24,00	29,00	
		i. Ketersediaan energi dan protein per kapita							
		- Energi per kapita	2.000	2.100	2.200	2.300	2.350	2.400	
		- Protein per kapita	50	52	54	56	58	60	
		j. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	81	82	83	84	85	85	
k. Stabilitas harga dan pasokan pangan	82	85	88	90	100	100			
l. Penguasaan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100			
m. Penanganan Daerah Rawan Pangan	47	50	52	55	58	62			
n. Produktivitas Padi sawah	5.553	4.554	4.576	4.514	4.761	4.79			
o. Produksi Padi	245.126	179.250	180.146	186.091	196.273	196.600			
p. Produktivitas Jagung	5.065	6.265	6.270	6.144	6.415	6.496			
q. Produksi Jagung	44.942	42.907	43.336	45.091	45.091	45.541			
r. Jumlah Kelompok Tani Binaan	866	870	872	875	884	885			
a. Persentase koperasi aktif (%)	70	70,99	71	72	73	74			
b. Usaha Mikro dan Kecil (unit)	88.139	88.299	101.120	101.310	101.415	101.600			
c. Jumlah bank dan cabang	58	61	64	67	70	74			
d. Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	4	5	5	6	6	7			
e. Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,02	5,17	4,9-5,4	5,0-5,5	5,5-5,6	5,5-5,6			
f. Laju inflasi	3,83	8,08	7,65	5±1	5±1	5±1			
g. PDRB per kapita ADHK	3,65	3,83	4,27	4,58	4,89	4,89			
h. Indeks Gini	0,310	0,300	0,305	0,305	0,304	0,304			
i. Indeks Pembangunan Manusia	71,41	72,03	72,52	73,01	73,51	73,51			
i. Presentase Penduduk Miskin	12,4	11,96	11,86	11,76	11,66	11,66			

1	KEPALA DAERAH	11,66	11,66
2	STAF AHLI BID. PENERINTAHAN	73,51	73,51
3	ASISTEN ADMINISTRASI	11,66	11,66
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	4,89	4,89
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	4,89	4,89

1. Kepala Daerah
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 3. Asisten Administrasi
 4. Kepala Bagian Organisasi
 5. Kepala Bagian Hukum

14	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal	a. Kunjungan Wisata	426,495	430,123	433,751	437,379	441,007	444,635	DISPARPORA	
		b. Penyelenggaraan festival seni dan budaya (keali)	12	12	12	12	12	12	DISDIKBUD	
		c. Obyek Wisata yang diangrani	5	5	5	5	5	5	DISPARPORA	
		d. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	750 juta	750 juta	800 juta	850 juta	900 juta	1 milyar	DISPARPORA	
		h. Jenis, kelas, dan jumlah restoran	74	78	82	86	90	94	DISPARPORA	
		i. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	4	8	8	9	9	10	DISPARPORA	
		a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	75	80	85	90	95	95	DPUPRR	
		d. Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik (%) (>40 Km/ jam)	64,44	67,78	70,00	75,11	80,00	80,00	DPUPRR	
		h. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	-	-	-	-	-	83,16	DPUPRR	
		j. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	95,64%	95,88%	96,00%	96,20%	96,40%	96,40%	DPUPRR	
k. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,17	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	DLH			
m. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan airan air tidak tersumbat	31,05%	31,05%	33,63%	34,47%	35,33%	36,21%	DPURKP			
n. Lingkungan Pemukiman	15,36	17,59	19,82	22,05	24,28	24,28	DPURKP			
16	Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur	a. Ketaatan terhadap RTRW, (%)	95	95	100	100	100	100	DPUPRR	
		b. Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	2,99	3,58	3,62	3,98	4,77	5,73	DPUPRR	
17	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat	a. Rasio Rumah layak huni (%)	86,1	87,5	88,5	89,5	90,5	72	DPURKP	
		b. Persentase Rumah Tinggal berantiasi (%)	45,96	46,5	48	50	52	55	DPURKP	
		c. Rumah tangga pengguna air bersih	68,51%	68,50%	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	DPURKP	
		d. Lingkungan pemukiman kumuh	0,41	0,25	0,22	0,20	0,18	27	DPURKP	
		e. Persentase pemohon sertifikat yang terlayani	-	-	-	-	-	-	-	-
		f. Pro-na (Program Nasional) yang terlayani	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	DIREKTUR	DISPARPORA
2	ASISTEN	DISPARPORA
3	ASISTEN	DISPARPORA
4	KEPALA BAKORAN	DISPARPORA
5	KEPALA LAJANG	DISPARPORA

		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
18	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang baik	a. Jumlah angkutan umum yang berkeselamatan	-	-	-	-	-	4056	DINHUB
19	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan	a. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	0,29	0,15	70	75	75	80	DINSOS
		b. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	2,43	18,72	30	35	35	40	DINSOS
20	Terwujudnya penyelenggaraan KB/KS	a. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	127.848	125.287	123.920	122.552	121.184	119.816	DP3AP2KB
		b. Cakupan peserta KB aktif (%)	-	-	-	-	-	85,50	DP3AP2KB
21	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi	a. Kepemilikan KTP el (%)	86	87	87	88	89	90	DISDUCAPIL
		b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	432	437	467	497	527	557	DISDUCAPIL
		c. Pengiriman Transmigrasi (KK)	15	8	9	10	15	5	DPMPTSP DAN NAKER
		d. Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun	455.543	15.961	14.212	14.285	14.723	15.888	DISDUCAPIL
22	Memingkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)	2,02	1,94	1,94	1,94	1,95	1,95	DP3AP2KB
		b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	178.409	181.058	192.914	194.216	195.526	196.845	DP3AP2KB
		c. Rasio KDRT	0%	0%	0%	0%	0%	0%	DP3AP2KB
		d. Partisipasi angkatan kerja perempuan	182.086	184.642	196.577	197.933	199.299	200.674	DP3AP2KB
		e. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DP3AP2KB
23	Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat	a. Angka usia harapan hidup	70,57	70,97	70,97	70,98	70,99	71	DINKES
		b. Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	DINKES
		c. Kasus Kematian Ibu	25	14	19	18	17	16	DINKES
		d. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	13,14	14,85	13	12,5	12	11,5	DINKES
		e. Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	14,72	18,12	17	16,50	16	15,50	DINKES
		f. Incident rate DBD per 100.000 penduduk	38,00	61,70	<20	<20	<20	<20	PAI
		g. Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk	0,67	0,85	<1	<1	<1	<1	PAI

1	SEKRETARIS DINKES RAJA
2	STAF AHLI BIDANG KESEHATAN
3	ASISTEN DAN ANGGOTA
4	KEMALA BAGI MANUNGGAWATI
5	KIRANA

		h. Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)	12,36%	11,83%	11,70%	11,00%	10,70%	10,50%	DINKES	
		i. Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk	84,32%	80,31%	79,00%	78,00%	77%	76%	DINKES	
		j. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	DINKES	
24	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	a. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	2%	3%	4%	5%	6%	7%	DIPERMADES	
25	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM	a. Angka Melek Huruf (%)	89,93	90,67	92	95	98	100	DISDIKBUD	
		b. Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	6,73	6,74	6,8	6,9	7	7,2	DISDIKBUD	
		c. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	53,30	56,14	60,00	63,30	66,14	70,00	DISDIKBUD	
		d. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	103,15	104,10	104,50	104,75	104,85	105,00	DISDIKBUD	
		- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	89,50	90,50	91,75	93,00	94,00	95,00	DISDIKBUD	
		- Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Paket C	40,03	43,35	46,50	49,22	52,25	55,00	DISDIKBUD	
		e. Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk								DISDIKBUD
		- Jenjang SD/Sederajat	40,00	42,65	45,12	48,56	50,12	52,00	DISDIKBUD	
		- Jenjang SMP/Sederajat	13,00	13,12	14,18	16,11	18,12	20,00	DISDIKBUD	
		- Jenjang SMA/Sederajat	7,50	7,90	8,18	8,50	9,20	9,20	DISDIKBUD	
		f. Angka Partisipasi Murni								DISDIKBUD
		- Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	90,10	91,15	92,10	93,64	94,16	95,00	DISDIKBUD	
		- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	65,10	70,12	75,63	78,15	80,68	82,66	DISDIKBUD	
		- Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	37,38	39,15	41,75	43,14	47,89	50,00	DISDIKBUD	

BUPATI BATANG,

M

WIHAJI

PARAF

1	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN	
3	ASISTEN ADMINISTRASI	<i>[Signature]</i>
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
A. SEKRETARIAT DAERAH									
1 Meningkatkan koordinasi dan pelayanan tertib administrasi pemerintahan	1 Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	-	-	-	-	-	-	6000 surat	BAG. UMUM
	2 Rata-rata jumlah faksimile masuk yang terdistribusikan	-	-	-	-	-	-	1500 faksimile	BAG. UMUM
	3 Rata-rata jumlah surat keluar atas nama Bupati	-	-	-	-	-	-	1600 surat	BAG. UMUM
	4 Kelepatan waktu penyusunan LPPD dan LPPD AMJ, LKPJ dan LKPJ AMJ	Bulan Maret	Bulan Maret	Bulan Maret	Bulan Maret	Bulan Maret	Bulan Maret	Bulan Maret	BAG. TAPEM
	5 Terlaksananya pelayanan administrasi kecamatan secara online dengan penerapan system PATEN	Sosialisasi rencana penerapan system PATEN	Sosialisasi rencana penerapan system PATEN	Pengadaan sarana prasarana (komputer beserta jangannya) dan pelatihan pelugas pengelola	15%	50%	15 Kecamatan	BAG. TAPEM	
2 Meningkatkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspirasi masyarakat dan perkembangan pembangunan daerah	1 Persentase jumlah Rapenda yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam Prolegda	40%	43%	45%	45%	48%	50%	BAG. HUKUM	
	2 Persentase jumlah Rapertbup yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam Prolegda	88%	89%	90%	90%	91%	93%	BAG. HUKUM	
	3 Persentase jumlah Rancangan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah diharmonisasi sesuai usulan dalam Prolegda	88%	89%	90%	90%	93%	95%	BAG. HUKUM	
3 Meningkatkan pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat dan penyediaan sarana	1 Persentase jumlah perkara hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan gugatan perdata dan TUN yang masuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. HUKUM

1	SEKRETARIAT DAERAH	100%	PADA BAG. HUKUM
2	STABAL BID. PERENCANAAN		
3	ASISTEN ADMINISTRASI		
4	KEPADA SAHABAT KERJA		
5	KEMERDEKAAN BERKUALITAS		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Prasarana hukum demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum	2. Persentase jumlah kajian hukum yang dapat diselesaikan berdasarkan permasalahan hukum yang ada dan atau pengajuan kajian hukum dari SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. HUKUM
		3. Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi/penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan berdasarkan Renja	94%	93%	94%	95%	97%	99%
	4. Persentase jumlah anggota Pangepel Rantam yang mengikuti rakor HAM berdasarkan Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. HUKUM
	5. Persentase jumlah Rakor dan Pembinaan SJD berdasarkan Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. HUKUM
	6. Persentase jumlah produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang tersebarkan berdasarkan Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. HUKUM
	1. Nilai transaksi yang masuk melalui kegiatan promosi pembangunan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.800.000	5 Milyar	BAG. PEREKONOMIAN
4. Meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang perkeonomian, perindustrian, perdagangan, pertanian, kehutanan, koperasi dan UMKM, serta pelaksanaan promosi pembangunan.	2. Rata-rata Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat	-	-	-	-	-	53.141 RTS	BAG. PEREKONOMIAN
	1. Deviden yang disetorkan ke Kabupaten Batang	2.115.426.953	2.373.631.621	2.631.836.289	4.213.447.694	4.173.650.360	8.506.687.057	BAG. PEREKONOMIAN
5. Meningkatkan sinergitas kebijakan dan pelaksanaan bidang investasi daerah dan meningkatnya kinerja BUMD	2. Perkembangan aset BUMD se-Kab. Batang	-	-	-	-	-	248.429.644.033	BAG. PEREKONOMIAN PARAH
	1. Jumlah Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD)	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	-	1. SE4 orang TARIK BAG. KESRAH 2. STAF AHLI BID. PERKONITANAN HUKUM DAN NEGOTIASI 3. ASISTEN MANAJEMEN NEGOTIASI 4. KEPALA BID. MAN. OPERASIONAL 5. KEPALA BAG. MAN. KESRAH
6. Meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang	1. Jumlah Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD)	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	-	1. SE4 orang TARIK BAG. KESRAH 2. STAF AHLI BID. PERKONITANAN HUKUM DAN NEGOTIASI 3. ASISTEN MANAJEMEN NEGOTIASI 4. KEPALA BID. MAN. OPERASIONAL 5. KEPALA BAG. MAN. KESRAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
Agama, Kebudayaan dan Kesenian serta penanganan penyandang masalah sosial	2 Jumlah sarana ibadah, Jumlah Madin, Ponpes dan MT, Jumlah TPQ yang dibantu	Masjid : 750; Musholla : 2000; Madin : 513; Ponpes/MT : 442; TPQ : 276	Masjid : 750; Musholla : 2000; Madin : 513; Ponpes/MT : 442; TPQ : 276	Masjid : 750; Musholla : 2000; Madin : 513; Ponpes/MT : 442; TPQ : 276	Masjid : 750; Musholla : 2000; Madin : 513; Ponpes/MT : 442; TPQ : 276	Masjid : 800; Musholla : 2000; Madin : 550; Ponpes/MT : 500; TPQ : 300	Masjid : 800; Musholla : 2000; Madin : 550; Ponpes/MT : 500; TPQ : 300	BAG. KESRA			
		3 Jumlah penyandang masalah sosial yang dibantu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. KESRA		
		4 Prosentase penerima bantuan keagamaan tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. KESRA		
		5 Prosentase penerima bantuan sosial tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAG. KESRA		
		7 Meningkatkan sinergitas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1 Jumlah perolehan medali di Popoda	5 emas, 10 perak, 20 perunggu	5 emas, 10 perak, 20 perunggu	5 emas, 10 perak, 20 perunggu	5 emas, 10 perak, 20 perunggu	7 emas, 15 perak, 20 perunggu	9 emas, 20 perak, 20 perunggu	BAG. KESRA	
				2 Jumlah perolehan medali di MTQ	5 medali	5 medali	5 medali	5 medali	7 medali	7 medali	BAG. KESRA
				1 Prosentase SKPD yang mengimn LAKIP tepat waktu	24%	27%	30%	100%	100%	100%	BAG. ORGANISASI
				2 Prosentase jumlah SKPD yang telah menyusun SOP	0%	25%	50%	75%	100%	100%	BAG. ORGANISASI
				3 Prosentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan SPM	0%	25%	50%	75%	100%	100%	BAG. ORGANISASI
				4 Prosentase jumlah SKPD yang telah melaksanakan survey IKM	0%	25%	50%	75%	100%	100%	BAG. ORGANISASI
		8 Tenwujudnya kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif, efisien, berbasis kinerja dan pelayanan publik yang prima serta pelayanan administrasi kepegawain di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Batang	1 Realisasi jumlah peserta apel pagi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	BAG. ORGANISASI	
				2 Jumlah PNS yang terkena hukuman disiplin	0	0	0	0	0	0	BAG. ORGANISASI
3 Rata-rata jumlah peserta bintek pengadaan barang/jasa	-			-	-	-	-	-	BAG. ORGANISASI		
9 Meningkatkan etos kerja dan kemampuan aparaturn pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1 Realisasi jumlah peserta apel pagi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	BAG. ORGANISASI			
		2 Jumlah PNS yang terkena hukuman disiplin	0	0	0	0	0	0	BAG. ORGANISASI		
		3 Rata-rata jumlah peserta bintek pengadaan barang/jasa	-	-	-	-	-	-	BAG. ORGANISASI		

PARAF

1 SEI 130 orang ARIS DBAS, IPBU

2 STAF AHLI

3

4

5

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUBJERDATA			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
10 Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD yang efektif, efisien dan akurat	1 Prosentase penyerapan dana APBD	-	0%	0%	90%	90%	95%	BAG. UMUM			
		11 Meningkatkan tertib administrasi sistem pengelolaan anggaran yang efektif dan akurat	1 Jumlah SPM yang dicairkan	-	-	-	-	-	250	BAG. UMUM	
		2 Prosentase jumlah kegiatan yang terselesaikan tepat waktu	2 Prosentase jumlah kegiatan yang terselesaikan tepat waktu	80%	90%	90%	95%	97%	95%	BAG. UMUM	
		3 Prosentase jumlah SKPD yang dapat menyelesaikan target tepat waktu	3 Prosentase jumlah SKPD pengelola pelaporan pelaksanaan pembangunan	93%	94%	95%	95%	97%	97%	BAG. DALBANG	
		4 Prosentase jumlah dokumen pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan	4 Prosentase jumlah dokumen pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	BAG. DALBANG
		5 Presentase lelang melalui e-procurement	5 Presentase lelang melalui e-procurement	-	-	-	-	-	-	3%	BAG. DALBANG
12 Tertatanya pengelolaan administrasi aset baik bergerak maupun tidak bergerak	6 Presentase penyelesaian sengkah	1 Jumlah tanah milik Penda yang bersertifikat	1 Jumlah tanah milik Penda yang bersertifikat	-	-	-	-	-	100%	BAG. PBU	
		2 Jumlah penyelesaian penamaan rupa bumi buatan	2 Jumlah penyelesaian penamaan rupa bumi buatan	-	-	-	-	-	-	100%	BAG. PBU
		3 Jumlah penyelesaian kasus tanah	3 Jumlah penyelesaian kasus tanah	-	-	-	-	-	-	100%	BAG. PBU
13 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset untuk mendukung pembangunan daerah	Rata-rata jumlah bidang tanah yang dilelang	-	-	-	-	-	-	-	100%	BAG. PBU	
		Rata-rata jumlah pendapatan yang disetor dari lelang garapan tanah milik Penda	Rata-rata jumlah pendapatan yang disetor dari lelang garapan tanah milik Penda	-	-	-	-	-	-	-	100%
14 Terwujudnya pengelolaan kerumahaan, pertengkepan, kesekretaratan dan keprotokolan yang lancar dan efisien	1 Rata-rata jumlah acara resmi dan seremonial yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	BAG. PBU
		2 Rata-rata jumlah rapat yang difasilitasi	2 Rata-rata jumlah rapat yang difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	100%

300
BAG. UMUM
PARAF

1	SEKRETARIS DAERAH	375	BAG. UMUM
2	STAF AHLI BID. PERENCANAAN HUKUM DAN POLITEK		
3	ASISTEN ADMINISTRASI		
4	KEPALA BIDANG KEWASUS		
5	KEPALA BAGIAN TEKNIK		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUNBER DATA	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
17 Meningkatkan kualitas analisis media dan informasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang obyektif dan berimbang serta bertanggung jawab	1 Jumlah berita kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang disebarluaskan lewat media sosial dan media massa	-	-	-	-	-	-	528 berita	BAG. HUMAS
	2 Jumlah media nasional dan media lokal yang meliputi kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Batang	-	-	-	-	-	-	10 media	BAG. HUMAS
B. SEKRETARIAT DPRD									
1 Tenwujudnya SDM aparatur yang profesional	1 Pegawai yang mengikuti pelatihan / bintek / workshop dst	14	14	14	14	14	14	14	SEKRETARIAT DPRD
	2 Bintek/workshop yang diselenggarakan untuk SDM Setwan	10	10	10	10	10	10	10	SEKRETARIAT DPRD
2 Terwujudnya pelayanan prima	1 Rapat-rapat yang difasilitasi/diselenggarakan	222	222	222	222	222	222	222	SEKRETARIAT DPRD
	2 Prosentase laporan risalah rapat yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DPRD
	3 Prosentase notulen rapat yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DPRD
	4 Prosentase jenis laporan yang dibuat/disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DPRD
	5 Laporan yang dikirim tepat waktu	4	4	4	4	4	4	4	SEKRETARIAT DPRD
	6 Aduan yang ditindaklanjuti Sekwan untuk diajukan/dilanjutkan pada Pimpinan DPRD	6 aduan	6 aduan	6 aduan	6 aduan	6 aduan	6 aduan	6 aduan	SEKRETARIAT DPRD
3 Terperuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang representatif	1 Prosentase sarana prasarana kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DPRD
C. INSPEKTORAT									
1 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan	1 Peningkatan ketepatan OPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT DAERAH

PARAF

- 1 SEKRETARIS DAERAH
- 2 HUKUM DAN POLITIK
- 3 ASISTEN ADMIKORAS
- 4 KEPALA MANAJEMEN SUMBER
- 5 KEPALA MANAJEMEN SUMBER

SASARAN	INDIKATOR/KINERJA	TARGET							SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
2 Meningkatkan tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan	2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada Pelayanan Publik	1 Hasil survei kepuasan	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		2 Ketersediaan sarana-prasarana pendukung efektifitas pengawasan yang memadai	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
3 Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemda dan SKPD	1 Opini Laporan Keuangan Pemda	1	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	INSPEKTORAT
		2	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
4 Meningkatkan kualitas LKjip Pemda dan LKjip SKPD	1 Peningkatan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
5 Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	1 Peningkatan kepatuhan entitas pemeriksaan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan	1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
6 Meningkatkan kompetensi SDM pengawasan	1 Peningkatan profesionalisme aparaturnya	1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
7 Meningkatkan integritas SDM pengawasan	1 Peningkatan kepatuhan penerapan kode etik oleh aparaturnya	1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
		1	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT
D. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
1 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, dengan sasaran meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini	1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	53,30	56,14	60,00	63,30	66,14	75,00	DISDIKBUD
		2	103,15	104,10	104,50	104,75	104,85	105,00	DISDIKBUD
2 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk	1 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	1	89,50	90,50	91,75	93,00	94,00	95,00	DISDIKBUD
		2	90,10	91,15	92,10	93,64	94,16	95,00	DISDIKBUD
		3	90,10	91,15	92,10	93,64	94,16	95,00	DISDIKBUD

105,00
DISDIKBUD
DISDIKBUD
1 SEKRETARIS DAERAH
2 STAF DAERAH DISDIKBUD
3 ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
4 KEMAHAYUBANAN
5
6

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
Yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun	4 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	5 Angka Melanjutkan SD ke SMP	90,19	92,11	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKBUD	
		6 Angka Patus Sekolah SD/Sederajat	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	DISDIKBUD	
		7 Angka Patus Sekolah SMP/Sederajat	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	DISDIKBUD	
		1 Angka Lulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKBUD	
		2 Angka Lulusan SMP/MTs	99,85	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKBUD	
		3 Rerata Nilai UN SD/MI	7,40	7,50	7,60	7,80	7,90	8,00	DISDIKBUD	
		4 Rerata Nilai UN SMP/MTs	8,00	8,10	8,20	8,30	8,40	8,50	DISDIKBUD	
	4 Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pendidik dan tenaga kependidikan honorer yang diukur dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan, meningkatnya	1 Prosentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D4	a. PAUD	18,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	DISDIKBUD
			b. SD	56,00	66,00	76,00	86,00	90,00	95,00	DISDIKBUD
			c. SMP	88,00	89,00	90,00	93,00	95,00	100,00	DISDIKBUD
		2 Prosentase Guru bersertifikat Pendidik	a. SD	48,00	52,00	58,00	62,00	66,00	75,00	DISDIKBUD
			b. SMP	62,00	68,00	72,00	78,00	82,00	85,00	DISDIKBUD
			Angka rata-rata lama sekolah penduduk	6,73	6,74	6,80	6,90	7,00	7,20	DISDIKBUD
5 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan	1	89,93	90,67	92,00	95,00	98,00	100,00	DISDIKBUD		
	2									
6 Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan	1	Prosentase sekolah memiliki sarana prasarana pembelajaran untuk pendidikan kecakapan hidup	5,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	DISDIKBUD	
7 Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan dengan	1 Skor LAKIP Meningkat		80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00		
		2	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00		

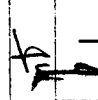
PARAF

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
3. Asisten Administrasi
4. Kepala Seksi Kurikulum
5. Kepala Bidang Pendidikan

SASARAN	INDIKATOR/KEINERJIA	TARGET						SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
8 Peningkatan jumlah desa budaya, peristiwa budaya dan kelompok kesenian	1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 Jumlah grup kesenian 3 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarkan 5 Jumlah peristiwa budaya	-	-	-	-	-	-	12 DISDIKBUD
		-	-	-	-	-	-	565 DISDIKBUD
		-	-	-	-	-	-	2 DISDIKBUD
		-	-	-	-	-	-	320 DISDIKBUD
		-	-	-	-	-	-	4 DISDIKBUD
E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
1 Meningkatkan kualitas ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	1 Jumlah Limas per jumlah 10.000 penduduk 2 Jumlah satuan Limas per Desa 3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/keurahan	4,6	4,8	5	5	5	-	SATPOL PP
		-	-	-	-	-	10	SATPOL PP
		6.18	6.26	6.34	6.46	6.54	5	SATPOL PP
2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup	1 Prosentase jumlah pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan dibandingkan jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan 2 Tertaksananya cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat di seluruh Kecamatan	-	-	-	-	-	10	SATPOL PP
		-	-	-	-	-	2.4 patroli	SATPOL PP
3 Meningkatkan standar kualifikasi petugas pemadam kebakaran	1 Jumlah aparatur Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 2	-	-	-	-	-	20 orang	SATPOL PP
		-	-	-	-	-	5 unit	SATPOL PP
4 Meningkatkan cakupan Mobil Damkar yang layak pakai dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	1 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran 3.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

1 SEKRETARIS DAERAH
 2 STAF PELAJIAN PERENCANAAN
 3 ASISTEN ADMI NISTRASI
 4 KEPALA BIDANG ORGANISASI
 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

PARAF



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	

F. DINAS PEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)

1	Terakomodasi kepentingan perempuan dan anak	1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	46%	74%	100%	100%	100%	100%	100%	DP3AP2KB
		2	Rasio akseptor KB	83,49%	80,85%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	DP3AP2KB	
		3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,522	2,522	2,522	2,522	2,5	2,5	DP3AP2KB	
2	Peserta KB Aktif dan peserta KB baru	1	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	83%	80,50%	82%	82,50%	83%	85,50%	DP3AP2KB	
		2	Rasio akseptor KB	83,49%	80,85%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	DP3AP2KB	
		3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,522	2,522	2,522	2,522	2,5	2,5	DP3AP2KB	
3	Menurunnya PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani	1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	8,50%	13,11%	6,50%	5,50%	5%	4,50%	DP3AP2KB	
4	Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok BKB	1	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	78,90%	80,30%	81%	81,50%	82%	82,5%	DP3AP2KB	
5	Semakin bertambah anggota kelompok UPPKS menjadi peserta KB	1	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	82,80%	86,30%	83%	84%	86%	87%	DP3AP2KB	
6	Rasio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	1	Rasio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan	0,31%	0,35%	64%	76%	88%	100%	DP3AP2KB	
7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	1	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	102%	102%	100%	100%	100%	100%	DP3AP2KB	
8	Penyediaan dan penyebaran data dan informasi kependudukan dan KB berbasis TI	1	Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DP3AP2KB	

G. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

1	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan, produk perkebunan dan hasil hutan	1	Produktivitas padi sawah (ton/ha)	-	-	-	-	-	-	-	DISPAPERTA	
		2	Produksi padi (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPAPERTA
		3	Produktivitas jagung (ton/ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPAPERTA
		4	Produksi jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPAPERTA
		5	Nilai tukar petani	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPAPERTA

3	ASISTEN ADMINISTRASI	196.600	DISPAPERTA
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	0.496	DISPAPERTA
5	KEPALA BAGIAN PERENCANA	45.541	DISPAPERTA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
2	Perfindungan lahan pertanian abadi	1	Persentase penggunaan lahan per tahun (%)	-	-	-	-	-	-	99,99	DISPAPERTA	
3	Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat	1	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	-	-	-	-	-	-	100%	DISPAPERTA	
		2	Persentase harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	-	-	-	-	-	-	100%	DISPAPERTA	
7	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan, produk, ketebunan dan hasil hutan	1	Cadangan pangan daerah	-	-	-	-	-	-	5 ton GKG	DISPAPERTA	
8	Peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan pekebun	1	Jumlah kelompok tani binaan	-	-	-	-	-	-	865	DISPAPERTA	
9	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi	1	keersediaan pangan utama :	-	-	-	-	-	-	102.744 ton	DISPAPERTA	
				-	-	-	-	-	-	39.737 ton		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400/kal/kap/hr	DISPAPERTA	
		-	-	-	-	-	-	-	-	60 gr/kap/hr		
		-	-	-	-	-	-	-	-	85		DISPAPERTA
H. DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
1	Penyusunan regulasi tentang pengelolaan lingkungan	1	Menurunnya angka pelanggaran	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
2	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (perikanan/penghijauan)	1	Menurunnya ekosistem pesisir dan laut yang rusak	70%	76%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
				3	Jumlah daya tampung TPS	138,21	140,15	137,87	140,63	143,44	146,31	146,31
3	Penyediaan tempat sampah terpilah	1	Meningkatnya jumlah tempat sampah terpilah	90%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH
				2	Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)	122	122	132	142	152	162	162
4	Penyediaan demplot pengolah sampah	1	Meningkatnya jumlah demplot pengolah sampah	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH

1. SEKRETARIS DAERAH
 2. STAF AHLI BIDANG PERENCANAAN
 3. ASISTEN ADMINISTRASI
 4. KEPALA UNIT ORGANISASI
 5. KEPALA BAGIAN HUKUM
 6. KEPALA BAGIAN LINGKUNGAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
5	Sampah terolah dan dimanfaatkan	1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah	85%	90%	95%	100%	100%	DLH	
6	Kelestarian Sumber Daya Alam	1	Menurunnya kawasan lingkungan yang tandus	80%	85%	90%	95%	100%	DLH	
7	Peningkatan kualitas lingkungan	1	Meningkatnya kesadaran kesehatan lingkungan	90%	95%	100%	100%	100%	DLH	
I. DINAS PARWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA										
1	Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, dan kelompok kesenian	1	Jumlah Desa Wisata	5	5	5	5	5	7	DISPARPORA
2	Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata	1	Jumlah Pengunjung obyek wisata	-	-	-	-	500.000	650.000	DISPARPORA
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek wisata dan usaha parwisata	1	Jumlah obyek wisata	5	5	5	5	7	10	DISPARPORA
		2	Jumlah usaha parwisata	-	-	-	-	115	167	DISPARPORA
4	Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olah raga secara kuantitatif dan kualitas	1	Jumlah kejuaraan dan olah raga di tingkat Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	3	DISPARPORA
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitan peranan pemuda sebagai subyek dan obyek pembangunan	1	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	3	3	4	4	DISPARPORA
		2	Jumlah Organisasi Pemuda	11	11	14	14	15	15	DISPARPORA
		3	Jumlah Organisasi Olahraga	27	30	32	34	35	36	DISPARPORA
		4	Jumlah Kegiatan Olahraga	3	3	3	4	4	4	DISPARPORA
6	Penyediaan sarana prasarana olahraga	1	Jumlah lapangan olahraga memenuhi standar	3	6	8	10	12	15	DISPARPORA
J. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSP DAN NAKER)										
1	Kemudahan proses investasi dan usaha	1.	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500	500	500	500	500	500	DPMPTSP DAN NAKER
		2.	Jumlah realisasi nilai investasi	114,00	120,52	126,54	132,87	139,52	146,49	DPMPTSP DAN NAKER
		3.	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.600	DPMPTSP DAN NAKER
		4.	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	DPMPTSP DAN NAKER
2	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	1	Pelayanan pelatihan keترampilan bagi pencari kerja	800	800	1.110	1.350	1.080	1.350	DPMPTSP DAN NAKER

1. SEKRETARIS DAERAH
 2. STAF TUJUT BID. PEG. EP. TER. MAN.
 3. ASISTEN MANAJEMEN PASI
 4. KEPALA SUBSISTEM MANAJEMEN
 5. KEPALA BID. MANAJEMEN


SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					SILVER DATA	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
3 Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja	1 Rasio pencari kerja yang ditempatkan (AKAN, AKAD, AKI)	50%	50%	50%	50%	60%	60%	DPMPTSP DAN NAKER
	2 Rasio lowongan pekerjaan yang tersedia	30%	30%	30%	30%	50%	50%	DPMPTSP DAN NAKER
4 Kondusifitas hubungan industrial	1 Rasio angka kepesertaan Jamsostek (BPJS Kelengkapan)	60%	60%	60%	60%	60%	60%	DPMPTSP DAN NAKER
	2 Rasio angka wajib laporan	50%	50%	50%	70%	70%	70%	DPMPTSP DAN NAKER
	3 Rasio besaran pemeriksaan perusahaan	30%	30%	30%	45%	45%	45%	DPMPTSP DAN NAKER
	4 Rasio besaran perusahaan yang mempunyai aturan K3	50%	50%	50%	60%	60%	60%	DPMPTSP DAN NAKER
	5 Rasio perusahaan yang telah membuat Peraturan Perusahaan	50%	50%	50%	70%	70%	70%	DPMPTSP DAN NAKER
5 Meningkatkan penyelenggaraan penempatan transmigrasi	1 Jumlah calon transmigrasi yang difasilitasi	10 KK	10 KK	20 KK	4 KK	4 KK	10 KK	DPMPTSP DAN NAKER
K. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI								
1 Meningkatkan usaha perindustrian daerah	1 Meningkatnya Retribusi Pasar dan Kekayaan daerah	1.850.018.250	1.830.890.250	1.806.750.000	2.097.029.120	2.016.000.000	2.236.401.360	DISPERINDAGKOP
	2 Pertumbuhan industri	10.404	10.488	10.573	10.660	10.755	10.851	DISPERINDAGKOP
	3 Jumlah unit usaha sentra industri	212	216	215	230	240	255	DISPERINDAGKOP
	4 kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB	25,61	26,02	25,6	25,75	26	26,05	DISPERINDAGKOP
	5 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,62	27,53	27,16	27,23	27,3	27,5	DISPERINDAGKOP
2 Meningkatkan usaha di bidang perdagangan	1 Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak disektor usaha perdagangan	750	755	735	725	735	740	DISPERINDAGKOP
	2 Jumlah nilai ekspor bersih	\$ 48.175.517,70	\$ 48.175.517,70	\$ 54.093.068,47	\$ 54.192.287,35	\$ 65.452.614,02	\$ 71.997.875,47	DISPERINDAGKOP
	3 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB%)	16,19	16,19	15,99	16	16,09	16,12	DISPERINDAGKOP
	4 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK%)	17,14	16,65	16,49	16,61	16,66	16,71	DISPERINDAGKOP
3 Meningkatkan kualitas Koperasi	1 Jumlah Koperasi Aktif	300	310	320	325	327	327	DISPERINDAGKOP
	2 Jumlah koperasi	300	310	320	325	327	327	DISPERINDAGKOP
	3 Usaha Mikro dan Kecil	101,12	101,335	101,12	101,31	101,415	101,415	DISPERINDAGKOP

1	SEKRETARIS	DISPERINDAGKOP
2	STAF A	DISPERINDAGKOP
3	ASIS	DISPERINDAGKOP
4	KEPALA BANGUNAN	DISPERINDAGKOP
5	KIRI	DISPERINDAGKOP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
L. DINAS KESEHATAN								
1 Meningkatkan kualitas sanitasi dasar	1 Cakupan rumah yang memenuhi syarat sanitasi dasar	60,90%	61%	62%	63%	64%	65%	DINKES
	2 Cakupan Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	70%	71%	72%	75%	80%	85%	DINKES
3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumber-deya	1 Cakupan Posyandu Mandiri	9,69	16,13	17,00	18,00	19%	20%	DINKES
	2 Cakupan Desa Siaga Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100%	DINKES
4 Perbudayaan Perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat	1 Cakupan rumah tangga Ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	74,13	82,63	85,00	86,00	87%	88%	DINKES
	2 Cakupan Puskesmas Terakreditasi	24,00	24,00	24,00	24,00	62,00%	62,00%	DINKES
5 Peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas dan jaringannya	1 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
	2 Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	DINKES
6 Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	1 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,41	DINKES
	2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	50,13%	51,60%	52%	52%	55%	55%	DINKES
7 Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin	1 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	10,58%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	DINKES
	2 Cakupan masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
	3 Cakupan Penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
8 Meningkatkan upaya kesehatan pada masyarakat sekolah	1 Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
	2 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	2,53%	3,19%	3,50%	4,50%	5,50%	6,50%	DINKES
9 Meningkatkan status gizi masyarakat	1 Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	12,36%	11,83%	11,70%	11,00%	10,70%	10,70%	DINKES
	2							

1 SEKRETARIS DAERAH
 2 KEPALA BIDANG OPERASIONAL
 3 KEPALA BIDANG POLITEKNIK
 4 KEPALA BIDANG OPERASIONAL
 5 KEPALA BIDANG POLITEKNIK

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUNBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
10 Meningkatkan status kesehatan masyarakat usia lanjut	1 Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	68,99%	69,11%	69,50%	70,00%	70,50%	71,00%	DINKES
	2 Usia harapan hidup	70,57	70,97	70,98	70,99	71,00	71,00	DINKES
11 Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak	1 Jumlah kasus kematian ibu	25,00	24,00	19,00	18,00	17,00	16,00	DINKES
	2 Angka Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	14,85	13,00	12,50	12	11,50	DINKES
	3 Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup		18,12	17,00	16,50	16,00	15,50	DINKES
	4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4	93,91%	93,66%	95,00%	96,00%	97,00%	97,50%	DINKES
	5 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
	6 Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,89%	95,41%	96%	96,50%	97,00%	97,50%	DINKES
	7 Cakupan pelayanan nifas	98%	95%	96%	97%	97,50%	98%	DINKES
	8 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80,00%	99,00%	99,45%	99,50%	99,55%	99,60%	DINKES
	9 Cakupan kunjungan bayi	97,35%	96,36%	97%	97,5%	98%	98,5%	DINKES
	10 Cakupan pelayanan anak balita (12 - 59 bulan)	83%	83,17%	84%	85%	86%	87%	DINKES
	11 Cakupan peserta KB Aktif	83,03%	81,08%	81,5%	82%	82,5%	83%	DINKES
12 Pemantauan dan pembinaan pengelola di sarana kesehatan dan pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat	1 Cakupan pemantauan dan pembinaan pengelola obat di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
	2 Cakupan Pangan Industri Rumah Tangga yang berijin	29,38%	83%	83%	85%	87%	90%	DINKES
13 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	1 Desakelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	95,16%	87,58%	98%	98,50%	100%	100%	DINKES
	2 Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2,26	2,25	>2	>2	>2	>2	DINKES
	3 Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	25,13%	14,59%	35%	45%	50%	55%	DINKES
	4 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif	77,28%	72,85%	77%	78%	79%	80%	DINKES
	5 Peresentase kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR)	92,06%	87,50%	89,00%	89,50%	90,00%	90,00%	DINKES

PARAF
 1 SEKRETARIS DAERAH
 2 STAF TUJUAN
 3 ASISTEN TUJUAN
 4 KEPALA BAKOR DAERAH
 5 KEPALA BAKOR MANDALAY


SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					SUMBER DATA					
		2012	2013	2014	2015	2016		2017				
14	Membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan	6	Prevalensi TB Paru BTA + per 100.000 penduduk	81,00	80,00	79,00	78,00	77	76	DINKES		
		7	Cakupan Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES	
		8	Angka Insidens Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	30,78	61,66	<20	<20	<20	<20	<20	DINKES	
		9	Cakupan Penderita Diare yang ditangani	39,06%	43,91%	50%	60%	70%	80%	DINKES		
		10	Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk	1	0,85	<1	<1	<1	<1	<1	DINKES	
		11	Cakupan desakelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES	
		1	Cakupan Puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis komputer	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES	
		M. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (DPUPR)										
		1	Tertaksananya pengembangan, peningkatan dan perbaikan jalan/jembatan	1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	DPUPR
				2	panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	65	68	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00
		2	Tertaksananya pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitas jaringan irigasi	1	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	66,71	71,6	78,27	80,05	83,16	83,16	DPUPR
2	tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada			95,64	95,88	96,00	96,20	96,40	96,40	96,40	DPUPR	
3	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau di Kab. Batang, perhatian lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber-HP/LHGB	2,99	3,58	3,52	3,62	4,77	5,73	DPUPR		
			Ketaatan terhadap RTRW	95%	95%	100%	100%	100%	100%	DPUPR		
			Luas wilayah produktif	79,85	79,85	84,74	86,43	88,16	89,92	DPUPR		
			Luas wilayah industri	1,49	1,51	1,57	1,60	1,63	1,67	DPUPR		
			Luas wilayah kehijauan	0,11	0,11	0,10	0,9	0,8	0,8	DPUPR		
			Luas wilayah perkotaan	14,38	14,38	15,26	15,57	15,88	16,19	DPUPR		

1. SEKRETARIS DPUPR BAH
 2. HUKUM DAN POLITIK
 3. ASISTEN ADMINISTRASI
 4. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
 5. KEPALA BAGIAN HUMAS

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012						2013						2014						2015						2016						2017						SUMBER DATA
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2012		2013		2014		2015		2016		2017		

N. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMUKIMAN

2	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (ciptakarya) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	1	Rumah tangga pengguna air bersih	67,71%	86,51%	70%	72%	74%	76%	DPRP		
			Rumah tangga dengan akses aman bersantiasi	-	-	-	-	-	-	55%	DPRP	
		4	Drainase lingkungan kondisi baik	32,01	32,81	33,63	34,47	35,33	36	DPRP		
		6	Rumah layak huni	58,2	59,37	85,00	88,00	91,00	91,00	72,00	DPRP	
		7	Jalan lingkungan kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	35	DPRP

O. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	Meningkatnya tertib kepemilikan dokumen kependudukan	1	Prosentase kepemilikan KTP el	86%	87%	87%	88%	89%	90%	DISDUKCAPIL
		2	Prosentase Kepemilikan kartu keluarga	86%	87%	87%	88%	89%	90%	DISDUKCAPIL
		3	Prosentase kepemilikan akte kelahiran	62%	63%	65%	66%	67%	70%	DISDUKCAPIL
		4	Rasio bayi ber-akte Kelahiran	0,50	0,55	0,77	0,89	0,90	0,91	DISDUKCAPIL
		5	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
		6	Rasio Akta Kematian	0,50%	0,70%	0,90%	1,00%	2,00%	2,00%	DISDUKCAPIL
		7	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	DISDUKCAPIL
2	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan lebih cepet, mudah dan memuaskan mencapai 100%	1	Rata-rata tenggang waktu penyelesaian KTP el	14 hari kerja	12 hari kerja	10 hari kerja	8 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	DISDUKCAPIL
		2	Rata-rata tenggang waktu penyelesaian Kartu Keluarga	14 hari kerja	12 hari kerja	10 hari kerja	8 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	DISDUKCAPIL
		3	Rata-rata tenggang waktu penyelesaian akte kelahiran	30 hari kerja	20 hari kerja	15 hari kerja	10 hari kerja	7 hari kerja	7 hari kerja	DISDUKCAPIL
		4	Jumlah aduan masyarakat	menurun dari tahun sebelumnya	menurun dari tahun sebelumnya	menurun dari tahun sebelumnya	menurun dari tahun sebelumnya	menurun dari tahun sebelumnya	menurun dari tahun sebelumnya	DISDUKCAPIL
3	Meningkatnya presentase penyediaan data dan informasi kependudukan yang valid, akurat dan dinamis untuk pelayanan publik dan pembangunan mencapai 90%	1	Database kependudukan hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISDUKCAPIL	

PARAF

- 1 SEKRETARIS DAERAH
- 2 STAF AHLI BID. PERUMUKIMAN DAN PERUMAHAN
- 3 ASISTEN ADMINISTRASI
- 4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
- 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	SUBBER DATA
---------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-------------

P. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1	Meningkatnya peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Jumlah rata-rata musyawarah desa yang diselenggarakan setiap tahunnya		9	9	9	9	10	10	10	11	DIPERMADES	
		2	Prosentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif (bertungsi)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DIPERMADES
		3	Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbangdes		-	-	-	-	-	-	-	-	50 usulan per Desa	DIPERMADES
		4	Jumlah Musdes yang dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	-	-	24 kali per tahun	DIPERMADES
		5	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (kp)		-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok per desa	DIPERMADES
		6	LPM berprestasi		-	-	-	-	-	-	-	-	1 kelompok per desa	DIPERMADES
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam membangun desa melalui pendayagunaan modal sosial masyarakat	1	Jumlah rata-rata kegiatan gotong royong di tiap desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DIPERMADES	
		2	Prosentase swadaya masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di desa		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DIPERMADES
		3	Tingkat kehadiran masyarakat dalam Musdes		-	-	-	-	-	-	-	-	50%	DIPERMADES
		4	Jumlah kegiatan swakelola		-	-	-	-	-	-	-	-	3 keg/desa	DIPERMADES
3	Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat	1	Jumlah kelompok simpan pinjam di perdesaan yang memperoleh bantuan/lambahan modal		4	4	4	4	4	4	4	17	DIPERMADES	
		2	Jumlah kelompok masyarakat yang omset atau penghasilannya meningkat setelah menerima bantuan		-	-	-	-	-	-	-	-	18	DIPERMADES
4	Meningkatnya peran wanita dalam pembangunan desa	1	Prosentase kehadiran perempuan dalam Musrenbangdes		5%	5%	7%	10%	15%	15%	15%	15%	DIPERMADES	
		2	Prosentase kehadiran perempuan dalam tiap Musdes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPERMADES
		3	Jumlah pengurus perempuan dalam LPMD/K		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIPERMADES
		4	Prosentase PKK Aktif		50%	50%	55%	60%	65%	65%	65%	65%	65%	DIPERMADES
		5	PKK Aktif		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30%
PARAF
DIPERMADES

1 SEKRETARIS DAERAH
DIPERMADES

2 KEPALA BIDANG DESA
DIPERMADES

3 KEMERDEKAAN
DIPERMADES

4 KEPALA BIDANG DESA
DIPERMADES

5 KEMERDEKAAN
DIPERMADES

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARUHI						SILBER DATA	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
5 Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan tanggung jawab dalam membangun diri dan lingkungannya	1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terpagar	750	750	800	850	700	677	DIPERMADES	
		2 Jumlah Pokmas yang mendapat pelatihan dan bantuan alat T TG (kelompok)	2	2	2	2	3	2	DIPERMADES
	6 Meningkatkan kapasitas pemdes/keurahan	1 Jumlah aparatur pemerintah desa/keurahan yang mengikuti pelatihan	560	560	560	560	2000	2750	DIPERMADES
		2 Jumlah desa yang telah memiliki dokumen perencanaan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DIPERMADES
		3 Jumlah desasakel yang telah menginput profil desakel secara online	-	-	-	-	-	248%	DIPERMADES
		4 Jumlah aparatur pemerintah desa/keurahan dan pengurus lembaga desa yang terlatih	248	248	-	Mengadakan pelatihan	Terlatihnya aparatur pemerintah desakel	116	DIPERMADES
		5 Jumlah aparatur Pemdes dalam pengelolaan keuangan desa (Kades, Sekdes, Bendahara Desa)	717	717	-	Siskudes	-	717	DIPERMADES
C. DINAS PERHUBUNGAN									
1 Pemetaan dan keterjangkauan transportasi	1 Jumlah arus penumpang angkutan umum	10.578.098	10.578.098	10.132.251	10.132.251	10.022.000	10.022.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2 Rasio jln trayek	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,65	DINAS PERHUBUNGAN	
	3 Jumlah uji kir angkutan umum	612	612	1.060	1.070	1.070	1.070	DINAS PERHUBUNGAN	
	4 Pelabuhan	1	1	1	1	1	1	DINAS PERHUBUNGAN	
	A. Pelabuhan Laut	1	1	1	1	1	1	DINAS PERHUBUNGAN	

- 1 SEKRETARIS DAERAH
- 2 STAF AHLI BID. PERHUBUNGAN
- 3 ASISTEN ADMINISTRASI
- 4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
- 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	SUMBER DATA		
R. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tersedianya sarana penunjang operasional kerja secara elektronik	B. Pelabuhan Lokal	5	Terminal								
			A. Type B	1								
				B. Type C	8							
			6		Angkutan Darat	3.520	3.520	3.530	3.535	4.000	4.000	DINAS PERHUBUNGAN
			7	Kepernikan KIR angkutan Umum	306	306	530	535	535	535	DINAS PERHUBUNGAN	
			8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	65 menit	65 menit	65 menit	65 menit	65 menit	65 menit	DINAS PERHUBUNGAN	
			9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	DINAS PERHUBUNGAN	
			10	Lalu Lintas :	A. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Jumlah)	0,000977	0,000977	0,000847	0,000847	0,000847	0,000847	DINAS PERHUBUNGAN
					B. Jumlah orang melalui terminal per tahun	705.689	705.689	690.980	689.850	650.250	650.250	DINAS PERHUBUNGAN
			R. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Tersedianya sarana transportasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan publikasi kegiatan pemerintahan	1	Jumlah titik jaringan Local Area Network	-	-	-	-	-	-	50	DISKOMINFO	
			2	Jumlah titik jaringan Wide Area Network	-	-	-	-	-	-	2	DISKOMINFO
			3	Jumlah lokasi internet gratis untuk publik	-	-	-	-	-	-	5	DISKOMINFO
			1	Jumlah website milik Pemerintah Daerah	10	10	10	25	25	25	20	DISKOMINFO
2	Meningkatnya jumlah sumber daya aparatur pemerintah yang menguasai TIK	1	Jumlah aplikasi layanan publik	-	-	-	-	-	-	10	DISKOMINFO	
			4	Jumlah aplikasi penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	-	-	-	10	DISKOMINFO
3	Meningkatnya jumlah sumber daya aparatur pemerintah yang menguasai TIK	1	Jumlah aparat pemerintah yang menguasai sistem informasi pemerintah	-	-	-	-	-	-	80 orang	DISKOMINFO	

yang
 SEKRETERIS DAERAH
 STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN
 HUKUM DAN POLITIK
 2
 ASISTEN ADMINISTRASI
 3
 KEPALA BAGIAN OPERASIONAL
 4
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 5

DISKOMINFO
 PARAF


SASARAN	INDIKATOR KUINERJA	RABE					2017	SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016		
4 Meningkatkan layanan dan tersedianya informasi untuk publik	1 Jumlah penyiaran radio lokal 2 Jumlah penyiaran radio komunitas 3 Jumlah penyiaran radio nasional 4 Jumlah penyiaran TV Nasional 5 Jumlah Video Tron	-	-	-	-	-	1 LPP 2 Titik	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	1 LPP 1 LPP	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	12 Channel	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	1 Unit	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	15 Kelompok	DISKOMINFO
5 Meningkatkan peran masyarakat dalam penyediaan informasi	1 Jumlah pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	-	-	-	-	-	130 manara	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	100	DISKOMINFO
6 Tersedianya sarana komunikasi untuk masyarakat	1 Jumlah menara telekomunikasi 2 Jumlah jaringan komunikasi	-	25	-	50	-	1 paket	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	-	-
7 Tersedianya sarana persandian dan telekomunikasi	1 Jumlah sarana persandian dan telekomunikasi	-	-	-	-	-	100%	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	100%	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	100%	DISKOMINFO
8 Terselenggaranya layanan sistem komunikasi untuk masyarakat	1 Keberhasilan informasi yang dikirimkan melalui telegram 2 Keberhasilan informasi yang dikirimkan melalui faximile 3 Keberhasilan informasi yang dikirimkan melalui sandi	-	-	-	-	-	1 Buku	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	1 Buku	DISKOMINFO
		-	-	-	-	-	1 Buku	DISKOMINFO
9 Terwujudnya pengelolaan data, informasi dan statistik	1 Tersedianya buku Batang Angka 2 Buku Kecamatan dalam angka	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
S. DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN								
1 Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan	1 Produksi perikanan tangkap (ton) 2 Produksi perikanan budidaya (ton)	30.548	32.716	34.000	36.000	38.000	38.000	DISLUTKANNAK
		1.283,20	1.796,10	2.250,50	2.700,60	3.240,72	3.240,72	DISLUTKANNAK
2 Meningkatkan kesadaran, kemampuan/pengelolaan mitigasi dan usaha pelestarian/rehabilitasi sumberdaya dari masyarakat	1 Cakupan bina kelompok pengawas (orang)	210,00	240,00	270,00	300,00	330,00	330,00	DISLUTKANNAK
		-	-	-	-	-	-	-
3 Mengelola kawasan konservasi secara komprehensif dari pemerintah disertai dengan identifikasi dan kajian potensi sumberdayanya	1 Tingkat pengelolaan konservasi	Didirikan						Dikelola secara optimum
		Dikelola secara minimum						
4 Meningkatkan usaha pembinaan dan pengembangan usaha perikanan	1 Cakupan bina kelompok tangkap (kelompok)	40	49	59	61	63		

PARAF

- 1 SEKRETARIS DAERAH
- 2 STAF AKBID DISLUTKANNAK
HUKUM DAN POLITIK
- 3 ACHMAD ANANDHASTRASI
- 4 KEPALA BAGIAN ENKAWASASI
- 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN		INDIKATOR KINERJA					2012					2013					2014					2015					2016					2017					SUMBER DATA
5	Meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat	2	Cakupan bina kelompok pengolahan dan pemasar perikanan (poklahasar)	17	14	15	17	20	20	DISLUTKANNAK																											
		1	Tingkat konsumsi ikan (kg/kapitah)	14	24,17	27	30	33	33	DISLUTKANNAK																											
6	Meningkatnya status kelas pada kelompok budidaya	1	Cakupan bina kelompok budidaya (kelompok)	85	70	60	65	68	68	DISLUTKANNAK																											
		1	Cakupan bina kelompok tangkap (kelompok)	40	49	59	61	63	63	DISLUTKANNAK																											
		2	Cakupan bina kelompok pengolahan dan pemasar perikanan (poklahasar)	17	14	15	17	20	20	DISLUTKANNAK																											
7	Bertambahnya jumlah kelompok masyarakat kelautan dan perikanan	3	Cakupan bina kelompok pengawasan (kelompok)	210	240	270	300	330	330	DISLUTKANNAK																											
		1	Jumlah populasi ternak (ekor) :	-	-	-	-	-	-	DISLUTKANNAK																											
		2	Jumlah produksi hasil ternak :	-	-	-	-	-	-	DISLUTKANNAK																											
8	Tercapainya dukungan program nasional swasembada daging 2014 dan kecukupan susu dan telur	1	- Sapi perah	-	-	-	-	-	-	133	DISLUTKANNAK																										
			- Sapi potong	-	-	-	-	-	-	16.927																											
			- Kerbau	-	-	-	-	-	-	1.373																											
			- Kambing	-	-	-	-	-	-	75.659																											
			- Domba	-	-	-	-	-	-	29.102																											
			- Ayam buras	-	-	-	-	-	-	567.772																											
			- Ayam ras	-	-	-	-	-	-	11.212.585																											
			- Ilik	-	-	-	-	-	-	106.945																											
			2	Jumlah produksi hasil ternak :	-	-	-	-	-	-		DISLUTKANNAK																									
			- Daging (kg)	-	-	-	-	-	-	-		9.558.099																									
			- Telur (Kag)	-	-	-	-	-	-	-		6.765.697																									
- Susu (liter)	-	-	-	-	-	-	-	103.884																													
9	Teraksananya pelayanan kesehatan hewan	1	Jumlah ternak yang diobati (ekor)	-	-	-	-	-	-	1.500	DISLUTKANNAK																										
		2	Prosentase kematian unggas	-	-	-	-	-	-	4%																											
		3	Prosentase ternak yang disuntik (dihitung dari populasi sapi)	-	-	-	-	-	-	3,29%																											
10	Meningkatnya ketersediaan pangan segar dan olahan hasil peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	1	Konsumsi protein hewani (gr/kapitahari)	-	-	-	-	-	-	-	DISLUTKANNAK																										
			- Daging	-	-	-	-	-	-	-																											
			- Telur	-	-	-	-	-	-	-		-																									
			- Susu	-	-	-	-	-	-	-		-																									
11	Terjadinya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam	1	Jumlah akseptor IB sapi (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	DISLUTKANNAK																										
		2	Jumlah kelahiran IB sapi (ekor)	-	-	-	-	-	-	-																											

13,22 PARAF

1 SEKRETARIS DAERAH
 2 SEKRETARIS DAERAH
 3 ASISTEN ADMINISTRASI
 4 KEPALA DAFTAR ORGANISASI
 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN	INDIKATOR/KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
menerapkan teknologi/inovasi baru	S/C Dosis inseminasi	-	-	-	-	-	1,90	DISPERPUSKA
		-	-	-	-	-	13,556	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	

T. DINAS SOSIAL

1 Meningkatkan pelayanan sosial guna menekan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1	Jumlah PGOT yang di kirim ke balai rehabilitasi sosial	80 Orang	80 Orang	100 Orang	36 Orang	30 Orang	50 Orang	DINSOS
	2	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitas pelatihan	75 Orang	75 Orang	95 Orang	62 Orang	65 Orang	50 Orang	DINSOS
	3	rasio PMKS (korban bencana) yang diberi Pelayanan Kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DINSOS
	4	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	100 Orang	200 Orang	200 Orang	1048 Orang	120 Orang	150 Orang	DINSOS
	5	Jumlah PMKS yang diberikan Jaminan Sosial	22 Orang	77 Orang	66 Orang	13170 Orang	14481 Orang	14481 Orang	DINSOS
2 Meningkatkan peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	1	Jumlah dunia usaha yang ikut serta dalam pembangunan kesos	25 Perush	25 Perush	27 Perush	27 Perush	30 Perush	30 Perush	DINSOS
			-	-	-	-	-	-	

U. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1 Meningkatkan dan mengembangkan jumlah dan koleksi bahan pustaka perpustakaan serta dokumen / arsip	1	Meningkatkan dan mengembangkan jumlah dan koleksi bahan pustaka perpustakaan	1.000 buku	3.000 buku	3.000 buku	-	750 buku	1.000 buku	DISPERPUSKA
	2	Jumlah arsip bernilai guna meningkat	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	1.500 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	DISPERPUSKA
2 Mengembangkan dan memperluas jasa layanan perpustakaan dan informasi serta pemanfaatan dokumen/arsip dalam rangka pembekalan separang hayati bagi seluruh masyarakat dan peran serta masyarakat	1	Jumlah titik layanan bertambah arsip / dokumen	120 titik	121 titik	122 titik	122 titik	122 titik	125 titik	DISPERPUSKA
			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DISPERPUSKA
			L = 10.000	L = 15.000	L = 17.500	L = 20.000	L = 25.000	L = 30.000	DISPERPUSKA
			P = 100.000	P = 125.000	P = 150.000	P = 175.000	P = 200.000	P = 225.000	DISPERPUSKA
			25.000 buku	30.000 buku	35.000 buku	40.000 buku	42.500 buku	40.000 buku	DISPERPUSKA
3	Jumlah judul yang dipinjam	10.000 judul	12.500 judul	15.000 judul	17.500 judul	20.000 judul	22.500 judul	DISPERPUSKA	
		40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	DISPERPUSKA	
1	Peningkatan jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem otomasi layanan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	40 perpustakaan	DISPERPUSKA	
		40 orang	50 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	DISPERPUSKA	
2	Peningkatan kemampuan SDM pengelola perpustakaan dan kearsipan	73 orang	50 orang	50 orang	20 orang	30 orang	30 orang	DISPERPUSKA	
		50 lokasi	50 lokasi	50 lokasi	20 lokasi	15 lokasi	15 lokasi	DISPERPUSKA	

PARAF

1. SEKRETARIS BID. PERPUSTAKAAN
2. KEPALA BID. PERPUSTAKAAN
3. ASISTEN ADMINISTRASI
4. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
5. KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN		INDIKATOR KINERJA					TARUHAN					SUMBER DATA														
		2012	2013	2014	2015	2016	2017																			
4	Meningkatkan sarana dan prasarana jasa layanan perpustakaan, informasi dan arsip	1	Pemantauan teknologi informasi/ otomasi pengolahan berbagai jenis perpustakaan	2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi		2 aplikasi		DISPERPUSKA										
		2	Akses arsip / dokumen secara cepat	2.000 berkas	1.500 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	2.000 berkas	DISPERPUSKA										
		3	Penerapan sistem otomasi dalam temu kembali arsip/dokumen	-	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	DISPERPUSKA									
5	Meningkatkan peran pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar membaca dan pelestarian arsip sebagai khasanah budaya bangsa	1	Layanan prima perpustakaan dan peningkatan kualitas jasa layanan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DISPERPUSKA										
		2	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan arsip/dokumen meningkat	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	DISPERPUSKA									
V. BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG																										
2	Meningkatnya kualitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah yang berkompeten dibidang perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	1	Prosentase SDM Perencana yang telah memperoleh pendidikan/ pelatihan Teknis Perencanaan	50%	50%	60%	70%	75%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	BAPELITBANG										
		1	Prosentase jumlah usulan prioritas desa hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir di Renja SKPD	70%	70%	75%	78%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	BAPELITBANG										
		2	Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	81%	81%	83%	88%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	BAPELITBANG										
		3	Prosentase jumlah program di RKPD yang diakomodir di KUA PPAS	80%	80%	87%	90%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	BAPELITBANG										
		4	Prosentase SKPD yang laporannya tepat waktu dan sesuai format	80%	80%	85%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	BAPELITBANG									
		5	Prosentase kegiatan yang selesai tepat waktu	84%	84%	88%	92%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	BAPELITBANG										
		<table border="1"> <tr> <td>100%</td> <td>BAPELITBANG</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>PARRAF</td> </tr> </table>															100%	BAPELITBANG	100%	PARRAF						
100%	BAPELITBANG																									
100%	PARRAF																									
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>SEKRETARIS DAERAH</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AGUSTEN/ADMINIS. TRASI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KEP. DAERAH/KEP. MANISASI</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KEP. DA. SAOT. MANAJEMEN</td> </tr> </table>															1	SEKRETARIS DAERAH	2	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN	3	AGUSTEN/ADMINIS. TRASI	4	KEP. DAERAH/KEP. MANISASI	5	KEP. DA. SAOT. MANAJEMEN
1	SEKRETARIS DAERAH																									
2	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN																									
3	AGUSTEN/ADMINIS. TRASI																									
4	KEP. DAERAH/KEP. MANISASI																									
5	KEP. DA. SAOT. MANAJEMEN																									

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	SUMBER DATA																																																							
3	Meningkatnya kajian dan hasil pembangunan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia daerah	1	Prosentase jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta data informasi/statistik daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah	85%	85%	87%	90%	95%	100%	BAPELITBANG																																																							
4	Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang	1	Persentase hasil kajian yang diakomodir/ditindaklanjuti SKPD	75%	75%	80%	85%	92%	100%	BAPELITBANG																																																							
5	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan potensi daerah	1	Prosentase penanganan indikator kinerja pembangunan bidang Sosbud yang ditindaklanjuti SKPD	78%	78%	80%	84%	90%	100%	BAPELITBANG																																																							
6	Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku	1	Prosentase kelengkapan data perencanaan tata ruang pembangunan wilayah strategis dan capai tumbuh	85%	85%	90%	92%	98%	100%	BAPELITBANG																																																							
		2	Rekomendasi kebijakan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh SKPD	82%	82%	85%	89%	90%	100%	BAPELITBANG																																																							
7	Terkoordinirnya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kabupaten Batang	1	Prosentase capaian air minum dan sanitasi daerah	89%	89%	92%	95%	97%	100%	BAPELITBANG																																																							
		2	Persentase sanitas daerah	80%	80%	83%	86%	95%	100%	BAPELITBANG																																																							
W. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																																																																	
1	Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak	1	Peningkatan persentase PAD dari sektor pajak	5%	5%	100%	100%	100%	100%	BPKPAD																																																							
		2	Prosentase peningkatan penerimaan pajak	-	1 paket	100%	100%	100%	100%	BPKPAD																																																							
		3	Tersusunnya Perbup tentang Pajak Daerah	9 perbup	-	-	-	-	-	BPKPAD																																																							
		4	Tercapainya kelancaran proses peralihan pajak pusat menjadi pajak daerah (PBB perkotaan dan perdesan)	1 paket	-	-	-	-	-	PARAF																																																							
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>SEKRETARIS DAERAH</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>STAF AGENSI BID. PEMERINTAHAN</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AGLUTEN ADMINISTRASI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KEPALA OPD DAN ORGANISASI</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KEPALA BAGIAN HUKUM</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </table>											1	SEKRETARIS DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2	STAF AGENSI BID. PEMERINTAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	AGLUTEN ADMINISTRASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4	KEPALA OPD DAN ORGANISASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5	KEPALA BAGIAN HUKUM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	SEKRETARIS DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																							
2	STAF AGENSI BID. PEMERINTAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																							
3	AGLUTEN ADMINISTRASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																							
4	KEPALA OPD DAN ORGANISASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																							
5	KEPALA BAGIAN HUKUM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																							

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RSE						SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendampingan aplikasi SIMDA	1 Tersusunnya sistem komputerisasi pengelolaan SIMDA Keuangan	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	67 SKPD	47 OPD	BPKPAD
		62 SKPD	62 SKPD	110 Pegawai	110 Pegawai	93 Pegawai	100%	BPKPAD
3 Meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah	1 Persentase pegawai yang sesuai dengan standar kompetensinya	62 SKPD	62 SKPD	110 Pegawai	110 Pegawai	93 Pegawai	20 Pegawai	BPKPAD
		62 SKPD	62 SKPD	110 Pegawai	110 Pegawai	93 Pegawai	20 Pegawai	BPKPAD
4 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan asset daerah serta pembuatan Juknis sebagai acuan laporan dan informasi asset daerah	1 Jumlah penyelenggaraan bintek administrasi asset melalui aplikasi SIMDA barang	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	67 SKPD	47 OPD	BPKPAD
		62 SKPD	62 SKPD	110 Pegawai	110 Pegawai	93 Pegawai	20 Pegawai	BPKPAD
5 Meningkatkan kompetensi SDM pengelola asset	1 Tercapainya kodifikasi barang milik daerah	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	67 SKPD	47 OPD	BPKPAD
		62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	67 SKPD	47 OPD	BPKPAD
6 Meningkatkan tata kelola asset yang akuntabel	1 Tercapainya penataan administrasi asset/BMD	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	67 SKPD	47 OPD	BPKPAD
		62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	62 SKPD	67 SKPD	47 OPD	BPKPAD
7 Mewujudkan lap. Keuang-an daerah	1 Opini WTP	-	62 SKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
		62 Buku	62 Buku	60 Buku	60 Buku	60 Buku	100 Buku	BPKPAD
8 Meningkatkan sarana prasarana pendukung kinerja dan peningkatan SDM dalam menyediakan data dan informasi stakeholder	1 Tersusunnya analisa standar belanja	120 Buku	120 Buku	120 Buku	120 Buku	120 Buku	150 Buku	BPKPAD
		62	62	62	100%	100%	100%	BPKPAD
X. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
1 Tertib administrasi kepegawain	1 Prosentase tepat waktunya proses penyelesaian dokumen kader ASN, meliputi :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BKD
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	PARAF

- 1 SEKRETARIS DAERAH
- 2 STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK
- 3 ASISTEN ADMINISTRASI
- 4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
- 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	SUMBER DATA
2	Profesionalisme Aparatur Pemerintah	1	- Prosentase Pensiun Pegawai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BKD
		2	- Prosentase updating data PNS Kabupaten Batang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1	Prosentase penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	-	-	-	-	-	-	
		2	Prosentase pejabat yang telah mengikuti diklat/im sesuai jenjang jabatannya.	10	46	84	56	40	40	
Y. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
1	Terwujudnya perilaku politik masyarakat Batang yang dilandasi moral dan etika nilai-nilai luhur budaya Bangsa dan menghargai HAM	1	Tertaksananya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 kali	2 kali	4 kali	3 kali	3 kali	4 kali	KESBANGPOL
		2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	2	3	2	2	3	2	KESBANGPOL
2	Tumbuhnya kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman dan gangguan NKRI, Pancasila serta meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban	1	Presentase demo yang tertangani	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
		2	Presentase penanganan konflik sosial	-	-	-	-	-	100%	KESBANGPOL
Z. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	Terwujudnya pengurangan risiko bencana serta penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana	1.	Peningkatan SDM Relawan	-	-	-	-	ada	ada	BPBD
		2.	Pelatihan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	2	2	BPBD
2	Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan daerah	1.	Peta risiko bencana	-	-	-	-	ada	ada	BPBD
3	Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang berperspektif pengurangan risiko bencana	1.	Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Lahan/Ruang	-	-	-	1	1	1	

PARAF

BPBD

1 SEKRETARIS DAERAH

2 STAF ASISTEN BID. PEMERINTAHAN

3 ASISTEN ADMINISTRASI

4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI

5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	SUMBER DATA	
4	Tersedianya regulasi penanggulangan bencana yang memadai	1						1	BPBD
5	Tersedianya mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.						2	BPBD
6	Tersedianya SDA yang kompeten dan Sarpras Penanggulangan Bencana yang memadai	1.						2	BPBD
7	Adanya budaya keselamatan dan ketahanan terhadap bencana dalam kehidupan sehari-hari	1.						2	BPBD
8	Tertfasiliasinya kerjasama pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	1.						3	BPBD
9	Adanya kesiapsiagaan dan mekanisme dalam kedaruratan bencana	1.						2	BPBD
		2.						80%	BPBD
10	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih aman dan lebih baik	1.						-	BPBD
		2.						2	BPBD
AA. Kecamatan Batang									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	10	12	15	17	19	21	KEC. BATANG
		2	13	15	17	19	21	21	KEC. BATANG
		3	40%	40%	60%	60%	75%	75%	KEC. BATANG
		4	40%	40%	60%	60%	75%	75%	KEC. BATANG
		5	80%	80%	90%	90%	95%	95%	KEC. BATANG
		6	80	90	90	100	100	100	KEC. BATANG

1 SEKRETARIS DAERAH
 2 STAF BID. P. KEGI. BATANG
 3 ASISTEN KEC. BATANG
 4 KEPALA BANGUN ORGANISASI
 5 KEPALA BANGUN KOMUM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	SUMBER DATA		
2 Meningkatkan tertib administrasi	1 Pengiriman laporan tepat waktu	1	4	5	6	7	8	9	KEC. BATANG	
		2	400	400	425	450	475	500	KEC. BATANG	
		3	600	600	625	650	675	700	KEC. BATANG	
		4	-	-	-	5	5	6	8	KEC. BATANG
		5	-	-	-	5	5	6	8	KEC. BATANG
		6	-	-	-	5	5	6	8	KEC. BATANG
		7	-	-	-	5	5	6	8	KEC. BATANG
		8	4	4	5	5	5	6	6	KEC. BATANG
3 Meningkatkan kompetensi aparatur	1 Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	1	2	2	2	2	2	2	KEC. BATANG	
		4	30%	30%	40%	40%	50%	50%	KEC. BATANG	
4 Meningkatkan sarana dan prasarana	1 Meningkatkan sarana dan prasarana kondisi baik	1	20	20	25	25	27	27	KEC. BATANG	
		5	20	20	25	25	27	27	KEC. BATANG	
BB. Kecamatan Wonotunggal										
1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1 Jumlah desa yang tertib administrasi	1	15	15	15	15	15	15	15	KEC. WONOTUNGAL
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan ((Jumlah aduan yang terselesaikan/jumlah aduan masuk) x 100%)	30	30	30	30	30	30	KEC. WONOTUNGAL
		3	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	150	150	150	150	150	150	KEC. WONOTUNGAL
		4	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	-	-	94	80	43	43	KEC. WONOTUNGAL
		5	Jumlah usulan Musrenbang	19	19	26	30	40	43	KEC. WONOTUNGAL
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	258	258	258	258	258	258	KEC. WONOTUNGAL
		7	Jumlah Limas yang dibina	24	24	24	24	24	24	KEC. WONOTUNGAL
2 Meningkatkan tertib administrasi	1 Pengiriman laporan tepat waktu	1	24	24	24	24	24	24	KEC. WONOTUNGAL	
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	60	60	60	60	60	60	KEC. WONOTUNGAL

1	SEKRETARIS	KEC. WONOTUNGAL
2	STAF ARAH BUREAU	KEC. WONOTUNGAL
3	ASISTEN ADMINISTRASI	KEC. WONOTUNGAL
4	KERALA DAJARAN OPERASIONAL	KEC. WONOTUNGAL
5	KERALA DAJARAN HUKUM	KEC. WONOTUNGAL

SASARAN	INDIKATOR/INERJA	Tahun						SUMBER DATA		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	semua						KEC. WONOTUNGGA KEC. WONOTUNGGA
				198	198	198	198	198	198	
				4	4	5	5	5	5	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	semua						KEC. WONOTUNGGA
				198	198	198	198	198	198	
				5	5	5	5	5	5	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
CC. Kecamatan Warungasem										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	semua						KEC. WARUNGASEM
				18	18	18	18	18	18	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2	2	2	2	2	2	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				200	200	200	300	300	300	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	Pengiriman laporan tepat waktu	semua						KEC. WARUNGASEM
				15	15	15	15	15	15	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2	2	2	2	2	2	
				1000	1000	1000	11100	1100	1100	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				15	15	15	15	15	15	
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	semua						KEC. WARUNGASEM
				30	30	25	25	25	25	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				3	3	3	3	3	3	
				500	500	500	700	700	700	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik	semua						KEC. WARUNGASEM PARAH
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DD. Kecamatan Bandar										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	semua						KEC. BANDAR
				10	10	13	15	17	17	
2	Prosentase aduan masyarakat yang	2	Prosentase aduan masyarakat yang	semua						KEC. BANDAR
				90%	92%	95%	95%	97%	97%	
1 SEKRETARIS DAERAH 2 STAF APT BID. KEC. BANDARAN 3 ASISTEN ADMINISTRASI 4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI 5 KEPALA BAGIAN HUKUM										

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun						SUMBER DATA				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017					
	terselesaikan ((Jumlah aduan yang terselesaikan/jumlah aduan masuk) x 100%)	3	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	285	325	350	380	450	475	KEC. BANDAR		
		4	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	20	25	25	25	30	30	35	KEC. BANDAR	
		5	Jumlah usulan Musrenbang	60	60	60	60	60	60	60	KEC. BANDAR	
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	5	5	5	5	5	5	5	KEC. BANDAR	
		7	Jumlah Linmas yang dibina	215	215	250	250	250	250	250	KEC. BANDAR	
		1	Pengiriman laporan tepat waktu	20	20	20	20	30	30	40	45	KEC. BANDAR
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	690	700	700	700	720	750	800	800	KEC. BANDAR
2	Meningkatnya tertib administrasi	3	Rata-rata jumlah surat keluar	340	345	360	400	500	600	600	KEC. BANDAR	
		1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	9	9	9	10	15	15	15	15	KEC. BANDAR
		1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	KEC. BANDAR
EE. Kecamatan Blado												
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	7	8	10	12	15	15	18	KEC. BLADO	
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan ((Jumlah aduan yang terselesaikan/jumlah aduan masuk) x 100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	KEC. BLADO
		3	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	700	725	750	770	800	825	825	825	KEC. BLADO
		4	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	-	-	-	-	19	30	30	30	KEC. BLADO
		5	Jumlah usulan Musrenbang	90	90	90	90	90	90	90	90	KEC. BLADO
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	36	36	36	36	36	36	36	36	KEC. BLADO
		7	Jumlah Linmas yang dibina	95	95	95	95	95	95	95	95	KEC. BLADO
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	Pengiriman laporan tepat waktu	60	64	66	68	70	70	70	KEC. BLADO	

- 1 SEKRETARIS KECAMATAN
- 2 STAF AHLI BID. PENGELOLAAN
- 3 ASISTEN ADMINISTRASI
- 4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
- 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN		INDIKATOR KINERJA						SUMBER DATA			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	4	4	4	5	5	5	KEC. BLADO	
		2	Rata-rata jumlah surat keluar	800	820	845	850	865	873	KEC. BLADO	
		3	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	890	915	925	950	970	1000	KEC. BLADO	
4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	80	83	86	92	95	97	KEC. BLADO	
		1	Jumlah desa yang tertib administrasi	10	12	14	16	17	19	KEC. REBAN	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	2	Jumlah aduan masyarakat yang terselesaikan	2	3	3	3	3	3	KEC. REBAN	
		3	Jumlah usulan Musrenbang	25 usulan fisik, 15 usulan ekonomi, 10 usulan sosbud	25 usulan fisik, 15 usulan ekonomi, 10 usulan sosbud	46 usulan fisik, 26 usulan ekonomi, 19 usulan sosbud	46 usulan fisik, 26 usulan ekonomi, 19 usulan sosbud	38 usulan fisik, 38 usulan ekonomi, 38 usulan sosbud	46 usulan fisik, 26 usulan ekonomi, 19 usulan sosbud	KEC. REBAN	
		4	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	93	93	181	181	181	181	181	KEC. REBAN
		5	Jumlah Limas yang dibina	200	220	230	250	270	285	285	KEC. REBAN
		1	Pengiriman laporan tepat waktu	15	15	15	15	15	15	15	KEC. REBAN
2	Meningkatnya tertib administrasi	2	Rata-rata jumlah surat masuk yang didistribusikan	750	750	789	789	928	1000	KEC. REBAN	
		3	Rata-rata jumlah surat keluar	989	1100	1150	1165	1105	1160	KEC. REBAN	
		1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	8	9	11	13	15	15	15	KEC. REBAN
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	80%	80%	80%	80%	85%	85%	KEC. REBAN	
		10									KEC. REBAN

KEC. REBAN
PARAF

- 1 SETUJUAN TARIK REBANAH
- 2 STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK
- 3 ASISTEN ADMINISTRASI
- 4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
- 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARUHAN						SULBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	

GG. Kecamatan Bawang										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	10	12	16	18	20	20	KEC. BAWANG
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan	60%	70%	80%	90%	100%	100%	KEC. BAWANG
		3	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	355	395	415	467	560	590	KEC. BAWANG
		4	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	-	-	-	25	50	55	KEC. BAWANG
		5	Jumlah usulan Musrenbang	86	90	96	100	100	120	KEC. BAWANG
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	100	120	130	145	183	187	KEC. BAWANG
		7	Jumlah Limmas yang dibina	120	140	150	150	270	270	KEC. BAWANG
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	Pengiriman laporan tepat waktu	10	12	14	15	15	15	KEC. BAWANG
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	858	1110	1102	1179	1190	1200	KEC. BAWANG
		3	Rata-rata jumlah surat keluar	369	455	356	420	600	620	KEC. BAWANG
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	2	2	2	2	2	2	KEC. BAWANG
		4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	75%	80%	85%	89%	80%

HH. Kecamatan Tersono										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	10	12	14	16	18	20	KEC. TERSONO
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan	80	75	85	80	90	95	KEC. TERSONO
		3	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	1200	1100	1150	1300	1325	1500	KEC. TERSONO
		4	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	-	-	-	200	210	225	KEC. TERSONO
		5	Jumlah usulan Musrenbang	20	26	30	25	30	30	KEC. TERSONO
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	20	18	20	20	20	20	KEC. TERSONO
		7	Jumlah Limmas yang dibina	110	110	115	120	125	125	KEC. TERSONO
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	Pengiriman laporan tepat waktu terdistribusikan	320	325	290	240	310	360	KEC. TERSONO
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	500	750	775	800	800	800	KEC. TERSONO
		3	Rata-rata jumlah surat keluar	1200	1230	1200	1250	1300	1300	KEC. TERSONO

1	SEKRETARIS DAERAH	1500	KEC. TERSONO
2	STAF AHLI BID. PERK. DAN POL. LOKAL	800	KEC. TERSONO
3	ASISTEN ADMINISTRASI		
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI		
5	KEPALA BAGIAN HUKUM		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun						SUMBER DATA
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	2	1	1	-	1	KEC. TERSONO
4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	80	85	87	90	95	KEC. TERSONO
		baik						

II. Kecamatan Limpung

1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	12	12	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	KEC. LIMPUNG	
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan ((Jumlah aduan yang terselesaikan/jumlah aduan masuk) x 100%)	92%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KEC. LIMPUNG
		3	Jumlah pelayanan Non Perzinan yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	KEC. LIMPUNG
		4	Jumlah pelayanan perzinan yang dilaksanakan	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KEC. LIMPUNG
		5	Jumlah usulan Musrenbang	60	60	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	KEC. LIMPUNG
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	12	12	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	KEC. LIMPUNG
		7	Jumlah Limnas yang dibina	60	60	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	KEC. LIMPUNG
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	Pengiriman laporan tepat waktu	30	30	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	KEC. LIMPUNG	
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	600	650	750	650	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	KEC. LIMPUNG	
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	3	Rata-rata jumlah surat keluar	275	300	300	300	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	KEC. LIMPUNG	
		1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	8	8	8	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	KEC. LIMPUNG	
4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	KEC. LIMPUNG	

JJ. Kecamatan Gringsing

1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	KEC. GRINGSING	
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan ((Jumlah aduan yang terselesaikan/jumlah aduan masuk) x 100%)	75	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	KEC. GRINGSING
		3	Jumlah pelayanan Non Perzinan yang dilaksanakan	2346	2065	886	6919	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	1182	KEC. GRINGSING
		4	Jumlah pelayanan perzinan yang dilaksanakan	-	-	-	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	KEC. GRINGSING

PARAF

- 1 SEKRETERAR KEK. GRINGSING
- 2 KEPALA BANGUNAN KEK. GRINGSING
- 3 ASISTEN ADMINISTRASI
- 4 KEPALA BANGUNAN ORGANISASI
- 5 KEPALA BANGUNAN HUMAS

SASARAN		INDIKATOR KINERJA							SUNBER DATA									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017											
2	Meningkatnya tertib administrasi	5	Jumlah usulan Musrenbang	601	638	709	243	879	850	KEC. GRINGSING	1	100%	KEC. SUBAH					
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	15	15	15	15	10	15	KEC. GRINGSING								
		7	Jumlah Limas yang dibina	100	125	300	125	150	300	KEC. GRINGSING								
		1	Pengiriman laporan tepat waktu	8	10	10	12	14	15	KEC. GRINGSING								
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	1042	1125	811	894	671	700	KEC. GRINGSING								
		3	Rata-rata jumlah surat keluar	564	653	738	531	375	385	KEC. GRINGSING								
		1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	5	7	10	12	15	17	KEC. GRINGSING								
		1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	60	65	70	70	75	80	KEC. GRINGSING								
		KK. Kecamatan Banyuputih																
		1	Tersedianya sarana pelayanan publik untuk masyarakat wilayah Subah	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	9	9	10	10	11				11	KEC. BANYUPUTIH	1	100%	KEC. BANYUPUTIH
				2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan	85%	90%	90%	100%	100%				100%	KEC. BANYUPUTIH			
				3	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	900	1058	800	736	745				755	KEC. BANYUPUTIH			
4	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan			-	-	-	10	32	50	KEC. BANYUPUTIH								
5	Jumlah usulan Musrenbang			33	33	33	33	33	33	KEC. BANYUPUTIH								
6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat			120	142	142	165	220	220	KEC. BANYUPUTIH								
7	Jumlah Limas yang dibina			8	10	10	12	14	15	KEC. BANYUPUTIH								
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	Pengiriman laporan tepat waktu	1010	1481	1020	818	592	618	KEC. BANYUPUTIH	1	100%	KEC. BANYUPUTIH					
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	487	611	467	334	345	370	KEC. BANYUPUTIH								
		3	Rata-rata jumlah surat keluar	4	4	5	6	7	8	KEC. BANYUPUTIH								
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	70%	75%	75%	80%	80%	85%	KEC. BANYUPUTIH	1	100%	KEC. BANYUPUTIH					
		1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	14	14	15	15	17	17	90%								
LL. Kecamatan Subah																		
1	Tersedianya sarana pelayanan publik untuk masyarakat wilayah Subah	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	14	14	15	15	15	17	17	1	100%	KEC. SUBAH					
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan	75%	80%	85%	85%	90%	90%	90%	1	100%	KEC. SUBAH					

PARAP

1	SEKRETARIS KEK. SUBAH	1	100%	KEC. SUBAH
2	STAF BID. POL. KEK. SUBAH	2	100%	KEC. SUBAH
3	ASISTEN ADMINISTRASI	3	100%	KEC. SUBAH
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	4	100%	KEC. SUBAH
5	KEPALA BAGIAN HUMAS	5	100%	KEC. SUBAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun						SULBERDATA		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
2	Meningkatnya tertib administrasi	3	Jumlah pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	5	KEC. SUBAH
		4	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan	-	-	-	6	6	6	KEC. SUBAH
		5	Jumlah usulan Musrenbang	170	183	200	220	80	150	KEC. SUBAH
		6	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat	3	3	4	4	5	5	KEC. SUBAH
		7	Jumlah Linmas yang dibina	495	495	495	495	495	495	KEC. SUBAH
		1	Pengiriman laporan tepat waktu	80%	85%	85%	90%	95%	100%	KEC. SUBAH
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	720	736	759	851	875	900	KEC. SUBAH
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	3	Rata-rata jumlah surat keluar	395	401	419	479	490	500	KEC. SUBAH
		1	Jumlah pegawai kecamatan yang mengikuti pelatihan	3	3	3	3	3	3	KEC. SUBAH
		1	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	80%	80%	80%	85%	90%	95%	KEC. SUBAH

MM. Kecamatan Pecalungan

1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Jumlah desa yang tertib administrasi	8	8	9	9	10	10	KEC. PECALUNGAN
		2	Prosentase aduan masyarakat yang terselesaikan ((Jumlah aduan yang terselesaikan/jumlah aduan masuk) x 100%)	90%	92%	95%	95%	97%	98%	KEC. PECALUNGAN
		3	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	250	300	350	375	400	425	KEC. PECALUNGAN
		4	Jumlah pelayanan Perizinan yang dilaksanakan	20	25	25	30	30	35	KEC. PECALUNGAN
		5	Jumlah usulan Musrenbang	50	50	50	50	50	50	KEC. PECALUNGAN
		6	Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat	5	5	5	5	5	5	KEC. PECALUNGAN
		7	Jumlah Linmas yang dibina	230	230	250	250	250	250	KEC. PECALUNGAN
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	Pengiriman laporan tepat waktu	20	20	20	30	40	45	KEC. PECALUNGAN
		2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	690	700	700	720	750	800	KEC. PECALUNGAN
		3	Rata-rata jumlah surat keluar	340	345	360	400	500	500	KEC. PECALUNGAN

- 1 SEKORUP JAKESPEALUNGAN
- 2 STAE AHLI BID. PEMERINTAHAN
- 3 ASISTEN ADMINISTRASI
- 4 KEPALA SUBAN CROMASASI
- 5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN		INDIKATOR KINERJA							SULBERDAVA	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	9	9	10	15	15	15	KEC. PECALUNGAN	
		1								
4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	75%	80%	80%	90%	90%	90%	KEC. PEALUNGAN	
		1								
NN. Kecamatan Tulis										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	9	11	13	15	16	17	KEC. TULIS	
		2	72%	78%	84%	90%	96%	100%	KEC. TULIS	
		3	5	5	5	5	5	5	KEC. TULIS	
		4	0	0	0	6	6	6		
		5	153	170	187	204	215	253	KEC. TULIS	
		6	4	4	5	5	6	6	KEC. TULIS	
		7	17 Kel	17 Kel	17 Kel	17 Kel	17 Kel	17 Kel	KEC. TULIS	
2	Meningkatnya tertib administrasi	1	75%	80%	85%	90%	95%	100%	KEC. TULIS	
		2	218	243	268	293	318	343	KEC. TULIS	
		3	175	200	225	250	275	300	KEC. TULIS	
3	Meningkatnya kompetensi aparatur	1	2	2	2	3	3	3	KEC. TULIS	
4	Meningkatnya sarana dan prasarana	1	70%	75%	80%	85%	90%	95%	KEC. TULIS	
OO. Kecamatan Kandeman										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	9	10	11	12	12	13	KEC. KANDEMAN	
		2	70%	75%	80%	85%	90%	100%	KEC. KANDEMAN	
		1								
		2								
		3								
		4								
		5								

1 SEKRETARIS DAERAH
2 STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN DAN POLITIK
3 ASISTEN ADMINISTRASI
4 KEPALA BAGIAN ORGANISASI
5 KEPALA BAGIAN HUKUM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Tahun					SILVER DATA		
		2012	2013	2014	2015	2016		2017	
	3	Jumlah pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	KEC. KANDEMAN	
	4	Jumlah pelayanan Perizinan yang dilaksanakan	-	-	-	6	6	KEC. KANDEMAN	
	5	Jumlah usulan Musrenbang	130	143	156	169	182	195	KEC. KANDEMAN
	6	Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat	3	3	4	4	5	5	KEC. KANDEMAN
	7	Jumlah Limas yang dibina	13 kelompok	13 kelompok	13 kelompok	13 kelompok	13 kelompok	13 kelompok	KEC. KANDEMAN
	1	Pengiriman laporan tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%	100%	KEC. KANDEMAN
	2	Rata-rata jumlah surat masuk yang terdistribusikan	200	225	250	275	300	350	KEC. KANDEMAN
	3	Rata-rata jumlah surat keluar	150	175	200	225	250	275	KEC. KANDEMAN
	1	Jumlah pegawai Kecamatan yang mengikuti pelatihan	2	2	2	2	2	2	KEC. KANDEMAN
	1	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	70%	75%	80%	85%	90%	95%	KEC. KANDEMAN
4	Meningkatnya sarana dan prasarana								

BUPATI BATANG,



WIHAJI

PARAF	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK
3	ASISTEN ADMINISTRASI
4	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
5	KEPALA BAGIAN HUKUM